

DAFTAR PUSTAKA

- Anhar, F. Y. (2020, Desember 16). Retrieved from Efektivitas Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara dengan Aplikasi e-BMN:
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-sorong/baca-artikel/13587/Efektivitas-Optimalisasi-Pengelolaan-Aset-Negara-dengan-Aplikasi-e-BMN.html>
- Ardi, D., & Hidayatuloh, R. (2021). Capital Budgeting Analysis To Assess The Feasibility Of Investment In State-Owned Idle Assets. *Balance Jurnal Ekonomi Volume 17 No. 2*, 265.
- Budiyanto, A. (2020, April 23). Retrieved from Pengamanan Barang Milik Negara Dalam Rangka Tertib Administrasi, Tertib Fisik dan Tertib Hukum:
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13043/Pengamanan-Barang-Milik-Negara-Dalam-Rangka-Tertib-Administrasi-Tertib-Fisik-dan-Tertib-Hukum.html>
- Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. (2009, Februari 17). Retrieved from Penataan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN):
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/2330/PENATAAN-PENGLOLAAN-BARANG-MILIK-NEGARA-BMN.html>
- Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. (2014, Juni 16). Retrieved from Mengenal SIMAN (Sistem Informasi Manajemen Aset Negara):
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/websiman/artikel/2014/06/mengenal-siman-sistem-informasi-manajemen-aset-negara?%2Fartikel%2F2014%2F06%2Fmengenal-siman-sistem-informasi-manajemen-aset-negara=>
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (n.d.). Retrieved from Profil Sejarah Kanwil DJPb: <https://djpnb.kemenkeu.go.id/kanwil/kaltim/id/profil/sejarah.html>
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (n.d.). Retrieved from Titian Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi:
<https://djpnb.kemenkeu.go.id/kppn/kualatungkal/id/titian/sakti.html>
- Hamdi. (2015). Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Negara. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 4*, 505.
- Humas Bapas Semarang. (2023, Mei 5). Retrieved from Pengelola Barang Milik Negara Ikuti Sosialisasi e-BMN Modul Pemanfaatan:
<https://www.kompasiana.com/bapas83438/64549757a7e0fa37b25c7582/pengelola-barang-milik-negara-ikuti-sosialisasi-e-bmn-modul-pemanfaatan?cv=1>

- Kementerian Keuangan. (2016). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara*. Jakarta.
- Kementerian Keuangan. (2016). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara*. Jakarta.
- Kementerian Keuangan. (2016). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 262 /PMK.01/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan*. Jakarta.
- Kementerian Keuangan. (2020). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.06/2020 Tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara*. Jakarta.
- Kementerian Keuangan. (2020). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 172/PMK.06/2020 Tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara*. Jakarta.
- Kementerian Keuangan. (2021). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.01/2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan*. Jakarta.
- Kementerian Keuangan. (2021). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 153/PMK.06/2021 Tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara*. Jakarta.
- Kementerian Keuangan. (2021). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207/PMK.06/2021 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara*. Jakarta.
- Kementerian Keuangan. (2021). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 334/KMK.01/2021 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan*. Jakarta.
- Kementerian Keuangan. (2022). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.01/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan*. Jakarta.
- Kementerian Keuangan. (2023). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 262 /PMK.01/2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara*. Jakarta.

- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Jakarta.
- Putri, F. S., & Ardiani, L. (2020). Optimalisasi Pemanfaatan Sewa Barang Milik Negara untuk Meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Volume 9 No. 1*, 12.